

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Gama Techno tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa disebut *good govenance* memiliki 4 indikator penting yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dibutuhkan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralisasi, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Pemerintah melaksanakan pembangunan atas kehendak rakyat yang disampaikan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya secara hati-hati adalah penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Penyusunan Belanja Daerah). Menurut jurnal Konton.co.id RAPBD adalah sebuah rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah baik rutin maupun pembangunan yang diperhitungkan dengan uang dan disetujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Sejalan dengan pendapat diatas, Bastian (2011) juga menjelaskan bahwa, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, maka belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta

menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Salah satu rujukan regulasi pemerintah yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran adalah Permandagri Nomor 64 Tahun 2020.

Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa (Nafarin 2009). Anggaran bukan hanya memiliki fungsi perencanaan dan pengendalian, anggaran juga digunakan sebagai salah satu indikator pengukuran agar suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan atau organisasi yang baik. Hal ini dikemukakan oleh Fachrurrozi (2009) yang menyatakan bahwa syarat-syarat sebuah perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan yang baik yaitu perusahaan tersebut harus memiliki: nilai, visi, misi, aturan, profesionalisme, rencana kerja, sumber daya, dan intensif. Rencana kerja yang dimaksudkan disini salah satunya adalah pembuatan anggaran.

Pada dasarnya semua kegiatan yang berhubungan dengan proses penyusunan anggaran sudah ditentukan siapa saja yang berwenang dalam penyusunan anggaran, apa-apa saja yang dilakukan dalam proses dari awal penyusunan anggaran tersebut dan kapan waktu dalam proses penyusunan anggaran hingga disahkan dan bisa dilaksanakan. Menurut Nafarin yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan berada di tangan pimpinan sebuah perusahaan.

Dalam proses penyusunan anggaran pasti ditemukan adanya hambatan-hambatan atau kendala dalam penyusunan anggaran mungkin menjadi lambat atau molor bahkan bisa terjadi kesalahan dalam penyusunan tersebut tidak berjalan dengan baik atau semestinya, meskipun pada umumnya proses penyusunan anggaran sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh instansi pemerintah daerah akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala.

Berdasarkan gambaran diatas, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan mengetahui tentang bagaimana prosedur penyusunan anggaran dengan melakukan kuliah kerja praktek/magang sebagai pengimplementasian teori yang telah didapat diperkuliahan dan menuangkannya kedalam bentuk laporan kerja praktek/proposal magang dengan judul yaitu **“Prosedur Penyusunan Anggaran Padan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyusunan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang?
2. Bagaimana tahapan dan jadwal proses penyusunan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang?
3. Apa saja hambatan-hambatan dalam penyusunan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang?

1.3 Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang?
2. Untuk mengetahui apa saja tahapan dan jadwal proses penyusunan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang?
3. Untuk mengetahui hambatan dan halangan dalam penyusunan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang?

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang diperoleh penulis selama kegiatan magang ini adalah:

- a. Bagi Penulis

1. Mendapatkan pengalaman dan juga dapat memahami bagaimana dunia kerja yang sebenarnya sehingga sewaktu sudah bekerja nanti sudah tau bagaimana cara untuk menyocokkan diri dengan lingkungan kerja.

2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan suatu pekerjaan yang biasa dilakukan oleh para pegawai instansi tersebut.

3. Dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh penulis selama bangku perkuliahan sehingga penulis bisa merasakan langsung manfaat ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan.

b. Bagi Program Diploma III FEB UA

1. Dapat menjaga hubungan kerjasama dengan instansi atau perusahaan sehingga nanti bisa terus menerima mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma III FEB UA untuk terus magang di instansi tersebut.

2. Dapat melihat seberapa banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan maupun yang diterapkan untuk mengarahkan mahasiswa memahami akan dunia kerja.

3. Mepererat kerjasama antara Universitas dengan instansi atau perusahaan.

4. Menghasilkan tenaga kerja profesional yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian sesuai dengan tuntutan lapangan.

c. Bagi Perusahaan/ Instansi

1. salah satu cara untuk membangun kerjasama lebih lanjut, baik yang bersifat akademis maupun non akademis antara universitas dengan instansi.

2. Instansi bisa melihat dan menilai tenaga kerja potensial di kalangan mahasiswa sehingga apabila suatu saat instansi atau perusahaan membutuhkan karyawan bisa merekrut mahasiswa tersebut.

3. Ikut andil dengan cara melakukan pelatihan terhadap mahasiswa sehingga menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan profesional.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Penulisan melakukan pengumpulan data (informasi dan keterangan) yang diperoleh melalui berbagai cara sebagai berikut:

- a.** Penelitian lapangan (*Field Research*) Penulis melakukan penelitian secara langsung ke objek penelitian seperti melakukan observasi dan tanya jawab dengan salah satu karyawan, baik lewat telpon atau datang langsung ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Padang dengan tujuan mengumpulkan data-data.
- b.** Penelitian kepustakaan (*Library Research*) Penulis mengambil data dengan membaca berbagai *literature* (buku buku dengan segala informasi yang relevan) dan dokumen-dokumen yang berkenaan secara langsung dengan penelitian.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Dalam pelaksanaan kegiatan magang ini saya sebagai penulis memilih instansi tempat magang yaitu kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 32374,32377 Fax (0751) 33996,32394. Sedangkan untuk waktu kegiatan magang ini sendiri dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja yang dimulai dari tanggal 14 Maret 2022 s/d 18 Mei 2022.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat 7 (tujuh) sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat kegiatan magang, metode pengumpulan data, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan teoritis yang memuat teori yang diperoleh dari materi perkuliahan, jurnal, maupun buku-buku yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini, membahas tentang gambaran umum mengenai sejarah perkembangan, kondisi, budaya, ruang lingkup, serta struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Padang.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan terkait hasil kegiatan magang prosedur penyusunan anggaran di BPKAD Padang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan dijelaskan kesimpulan dari pembahasan serta saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan dan berguna untuk perbaikan di masa yang akan datang.

